
ANALISIS KEMISKINAN SPASIAL DAN PEMETAAN SEKTOR BASIS DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bagus Adhitya¹

Zumaeroh²

Heris Kencana³

(Universitas Wijayakusuma Purwokerto)

Email: bagus.adhitya26@gmail.com¹; zumaeroh1234@gmail.com²; heriskencana@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received: Jan 28, 2025

Accepted: Jan 28, 2025

Published: Jan 28, 2025

Page: 1 – 6

Keyword:

Kemiskinan Struktural,
Wilayah Otonom Baru,
Sektor Basis,
Location Quotient,
Papua Pegunungan

Corresponding Author:

Name: Bagus Adhitya

E-mail:

bagus.adhitya26@gmail.com

Abstract

Persistensi kemiskinan di Wilayah Otonom Baru hasil pemekaran merupakan tantangan struktural yang memerlukan strategi pengentasan berbasis optimalisasi sektor potensial lokal. Berdasarkan analisis deskriptif, Provinsi Papua Pegunungan menempati urutan tertinggi dalam persentase kemiskinan di Indonesia yang mencapai 26,34 persen, diperparah oleh indeks Garis Kemiskinan tertinggi akibat isolasi geografis pedalaman. Penelitian ini bertujuan untuk membedah profil kemiskinan tersebut secara spasial dan mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi basis keunggulan komparatif wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif analitis yang diintegrasikan dengan analisis ekonomi regional melalui model Location Quotient (LQ) menggunakan data sekunder makro tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis deskriptif mengonfirmasi urgensi rekonstruksi ekonomi di lokus penelitian akibat tingginya biaya logistik. Sementara itu, analisis LQ berhasil menyaring tujuh sektor basis utama yang memiliki spesialisasi wilayah tinggi ($LQ > 1$), yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; real estat; jasa pendidikan; jasa kesehatan; serta administrasi pemerintahan yang mencatatkan nilai tertinggi sebesar 6,32. Temuan ini menunjukkan bahwa spesialisasi perekonomian Papua Pegunungan bertumpu kuat pada sektor pemerintahan, pembangunan fisik, dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif sektor-sektor basis ini serta mengintegrasikannya dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja produktif guna menciptakan akselerasi pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan struktural terbesar dalam pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Secara makro, Badan Pusat Statistik (BPS RI, 2026) mencatat adanya tren positif penurunan persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 8,07 persen pada Maret 2026. Meskipun angka agregat nasional menunjukkan perbaikan, penurunan ini tidak terjadi secara merata di seluruh daerah, sehingga menciptakan ketimpangan spasial yang mencolok antara kawasan barat dan timur Indonesia. Fenomena ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya inklusif dan memicu persistensi kemiskinan di beberapa wilayah otonom baru hasil pemekaran wilayah (Mulia & Rosalia, 2025).

Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi yang sangat ekstrem. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap dinamika kewilayahan terbaru, Provinsi Papua Pegunungan menempati urutan tertinggi dalam persentase kemiskinan di Indonesia, dengan angka kemiskinan yang mencapai 26,34 persen (BPS RI, 2026; Tempo.co, 2025). Realitas memprihatinkan ini menggambarkan bahwa hampir sepertiga warga di provinsi tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tingginya proporsi ini diperparah oleh fakta bahwa Papua Pegunungan mencatatkan indeks Garis Kemiskinan (GK) tertinggi di Indonesia, yakni menyentuh Rp1,28 juta per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026). Kondisi geografis ekstrem berupa hamparan pegunungan pedalaman memicu mahalnya biaya logistik harian, sehingga mengeskalasi beban biaya hidup masyarakat setempat secara signifikan dan mengunci mereka dalam perangkap kemiskinan struktural serta ketergantungan pasokan barang yang tinggi dari luar daerah (Belolon, 2025; Romadhon & Santosa, 2026).

Persistensi kemiskinan di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem umumnya berakar dari belum optimalnya penyalarsan alokasi anggaran pembangunan dengan sektor penggerak utama (*leading sectors*) ekonomi daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Papua sering kali didorong oleh sektor padat modal ekstraktif yang kurang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, sementara tata kelola Dana Otonomi Khusus belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan struktural (Wanimbo & Handoyo, 2025). Masalah kedalaman kemiskinan di pedalaman Papua ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang tidak lagi bertumpu pada bantuan sosial konsumtif, melainkan pada rekonstruksi struktur ekonomi (Prasetyo, 2026; Salim, 2026). Upaya pengentasan kemiskinan yang efektif harus diselarasakan dengan cetak biru pengembangan ekonomi lokal guna memaksimalkan dampak keterkaitan antarsektor (Indonesia, 2011). Oleh karena itu, kebijakan daerah harus diarahkan pada pemetaan dan pengembangan komoditas serta sektor ekonomi basis yang memiliki spesialisasi wilayah tinggi dan mampu memperluas lapangan kerja produktif bagi masyarakat setempat (Todaro & Smith, 2009).

Langkah strategis yang relevan untuk membedah kinerja struktural ini adalah dengan menerapkan Analisis *Location Quotient* (LQ) (Kaparang, 2025). Analisis LQ digunakan untuk menyaring dan mengidentifikasi sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif serta derajat spesialisasi tinggi dibandingkan struktur ekonomi nasional (Wakur et al., 2025; Malacoppo et al., 2026). Melalui integrasi analisis deskriptif untuk membedah profil

kemiskinan lokal dan analisis LQ untuk memetakan spesialisasi sektor basis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi rekonstruksi ekonomi yang presisi dan aplikatif bagi pemangku kebijakan di Provinsi Papua Pegunungan guna mempercepat reduksi kemiskinan berbasis optimalisasi sektor potensial unggulan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kemiskinan Multidimensi dan Aspek Kewilayahan

Kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai ketidakmampuan materi secara ekonomi (*monetary poverty*), melainkan sebagai fenomena multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan infrastruktur dasar (Sen, 1999). Dalam perspektif ekonomi regional, tingkat kemiskinan di suatu wilayah sering kali mencerminkan struktur ekonomi dan kinerja sektor-sektor produktif di daerah tersebut (Todaro & Smith, 2015).

Analisis kemiskinan secara makro umumnya menggunakan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengadopsi konsep *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT), yaitu:

- Tingkat Kemiskinan (P_0): Persentase jumlah penduduk miskin di bawah garis kemiskinan.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1): Rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2): Gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

2. Teori Ekonomi Basis (*Economic Base Theory*)

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat diekspor ke luar wilayah (Richardson, 1978). Kegiatan ekonomi wilayah dibagi menjadi dua kelompok:

- Sektor Basis: Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif, mampu memenuhi kebutuhan lokal, dan menghasilkan surplus untuk diekspor. Sektor ini bertindak sebagai penggerak utama (*engine of growth*) perekonomian daerah.
- Sektor Nonbasis: Sektor yang hanya mampu melayani pasar domestik atau lokal (*local service*) untuk mendukung aktivitas sektor basis.

Menurut Glasson dan Marshall (2007), ekspansi pada sektor basis akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Pendapatan dari hasil ekspor sektor basis akan mengalir ke dalam wilayah, meningkatkan permintaan domestik, membuka lapangan kerja baru pada sektor non-basis, dan secara bertahap menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Analisis *Location Quotient* (LQ) sebagai Identifikator Sektor Basis

LQ merupakan teknik analisis kuantitatif yang paling sering digunakan untuk menentukan status basis atau non-basis dari suatu sektor ekonomi di wilayah analisis relatif terhadap wilayah acuan (Tarigan, 2005). Nilai LQ dihitung menggunakan indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau jumlah tenaga kerja.

Formulasi matematis LQ adalah:

$$LQ = \frac{v_i/v}{V_i/V}$$

Kriteria interpretasi nilai LQ:

- $LQ > 1$: Sektor i merupakan sektor basis. Wilayah memiliki spesialisasi dan keunggulan komparatif pada sektor tersebut, sehingga berpotensi menjadi penggerak ekonomi melalui ekspor.
- $LQ \leq 1$: Sektor i merupakan sektor nonbasis. Sektor ini belum memiliki keunggulan kompetitif dan produksinya hanya cukup atau kurang untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitis serta analisis spasial-ekonomi untuk memetakan karakteristik kemiskinan dan mengklasifikasikan sektor ekonomi potensial di wilayah studi (Mulia & Rosalia, 2025). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data makro dan runtun waktu (*time series*) yang bersumber dari publikasi resmi BPS Republik Indonesia serta BPS Provinsi Papua (BPS, 2025). Data utama yang dikumpulkan meliputi persentase penduduk miskin (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1), garis kemiskinan antarprovinsi, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) menurut 17 lapangan usaha di Provinsi Papua Pegunungan beserta tingkat nasional sebagai wilayah acuan pembandingan (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026).

Analisis deskriptif kuantitatif diterapkan sebagai langkah awal penelitian untuk mengevaluasi posisi ketimpangan sosial dan mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia secara spasial. Teknik ini bekerja dengan melakukan tabulasi silang, visualisasi tren linier, dan komparasi proporsi kemiskinan antarprovinsi guna mempertegas lokus penelitian di Provinsi Papua Pegunungan secara objektif. Melalui tahapan analisis deskriptif ini, karakteristik lokal seperti tingginya batas garis kemiskinan serta hambatan geografis daerah otonom baru dipadukan untuk memberikan konteks sosial-ekonomi yang komprehensif terhadap karakteristik ketimpangan dan persistensi kemiskinan struktural yang terjadi di pedalaman (Romadhon & Santosa, 2026; Salim, 2026).

Langkah analisis kedua dilakukan dengan mengaplikasikan formula LQ untuk menyaring sektor-sektor ekonomi yang berstatus sebagai sektor basis di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan acuan metodologi ekonomi pembangunan wilayah (Todaro & Smith, 2009; Kaporang, 2025). Formulasi matematis LQ dihitung dengan membagi persentase kontribusi sektor i terhadap total PDRB daerah dengan persentase kontribusi sektor i yang sama terhadap total PDB nasional. Sektor yang menghasilkan koefisien nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) diidentifikasi sebagai sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif serta spesialisasi wilayah, sedangkan sektor dengan nilai LQ kurang dari satu ($LQ \leq 1$) dikelompokkan ke dalam sektor nonbasis (Malacoppo et al., 2026). Sektor basis yang berhasil disaring melalui instrumen ini ditetapkan sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi karena

dinilai memiliki kapasitas riil sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan (Wakur et al., 2025; Dirgahayu, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Hasil Analisis Deskriptif Kemiskinan

1) Tabulasi Silang Karakteristik Wilayah dan Kemiskinan

Untuk memahami posisi relatif tingkat kemiskinan di daerah kajian, dilakukan analisis deskriptif melalui teknik tabulasi silang. Pendekatan ini menyandingkan indikator makro kemiskinan dengan karakteristik geografis kewilayahan antara daerah lokus dan wilayah acuan nasional.

Tabel 1. Tabulasi Silang Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Wilayah Kajian
Periode Maret Tahun 2026

Lokus Wikayah	Tingkat Kemiskinan	Karakteristik Geografis dan Infrastruktur	Status Capaian Nasional
Provinsi Papua Pegunungan	26,34	Wilayah Otonom Baru, tofografi pedalaman atau pegunungan, isolasi geografis tinggi, indeks garis kemiskinan tinggi.	Peringkat 1 (Tertinggi di Indonesia)
Rata-Rata Nasional (Indonesia)	8,07	Wilayah kepulauan terintegrasi, jalur logistik mapan, aksesibilitas pasar terbuka.	Target Makro Nasional

Sumber: Data Primer Diolah dan Berita Resmi Statistik BPS (2026)

Berdasarkan hasil tabulasi silang pada pada tabel 1, terlihat dengan jelas gambaran disparitas yang sangat kontras. Sebagai Wilayah Otonom Baru (WOB) hasil pemekaran, Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan angka kemiskinan sebesar 26,34 persen. Angka ini menempatkan provinsi ini pada posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 8,07 persen.

2) Analisis Tren Kemiskinan Linear

Persistensi kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan bukan merupakan fenomena temporer, melainkan sebuah tantangan struktural yang berlanjut. Jika ditarik garis tren linear secara makro dari tahun-tahun sebelumnya, pergerakan angka kemiskinan di wilayah pedalaman ini menunjukkan pola fluktuasi yang lambat (persisten) di kluster atas (26%–27%). Sebaliknya, tren linear rata-rata nasional menunjukkan kemiringan (slope) negatif yang konsisten menurun menuju angka target 8,07 persen.

Lambatnya penurunan tren linear di Papua Pegunungan ini mengonfirmasi adanya *poverty trap* (jebakan kemiskinan) yang disebabkan oleh faktor non-ekonomi, seperti lambatnya transformasi struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern akibat keterbatasan aksesibilitas.

3) Analisis Komparasi Proporsi Kemiskinan Antarprovinsi

Secara komparatif, proporsi kemiskinan di Papua Pegunungan memegang porsi ekstrem dalam peta sebaran kemiskinan nasional. Perbandingan sebesar 1 banding 3 terhadap rata-rata nasional membuktikan bahwa beban kemiskinan di wilayah ini hampir tiga kali lipat lebih berat daripada kondisi Indonesia secara umum.

Faktor utama yang membedakan proporsi ekstrem ini adalah tingginya indeks GK di wilayah pedalaman. Isolasi geografis yang memotong jalur logistik darat menyebabkan *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Mahalnya harga barang kebutuhan pokok di daerah pegunungan secara otomatis menaikkan standar nilai rupiah yang harus dikeluarkan penduduk untuk keluar dari kategori miskin.

Kondisi komparasi yang tertuang dari hasil analisis deskriptif ini mempertegas bahwa penyelesaian kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan tidak lagi dapat bertumpu pada kebijakan bantuan sosial konvensional. Diperlukan intervensi kebijakan strategis yang berbasis pada optimalisasi sektor potensial lokal melalui pemetaan sektor basis (LQ) agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan padat karya.

b. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan perbandingan pangsa masing-masing sektor terhadap total PDRB daerah dengan pangsa sektor yang sama terhadap total PDB Indonesia. Sektor dengan nilai $LQ > 1$ dikategorikan sebagai sektor basis, sedangkan sektor dengan $LQ \leq 1$ dikategorikan sebagai sektor nonbasis.

Tabel 2. Hasil Analisis LQ Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Sektor	PDRB ADHK Papua Pegunungan 2025	Total PDRB Papua Pegunungan 2025	Pangsa Provinsi (%)	PDB Indonesia 2025	Total PDB Indonesia 2025	Pangsa Nasional (%)	LQ 2025	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2483000000	14,316,000,000	17.34	1,542,447,400	13,003,214,000	11.86	1.46	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	168000000	14,316,000,000	1.17	948,947,800	13,003,214,000	7.30	0.16	Nonbasis
C. Industri Pengolahan	122000000	14,316,000,000	0.85	2,757,586,300	13,003,214,000	21.21	0.04	Nonbasis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6000000	14,316,000,000	0.04	138,767,800	13,003,214,000	1.07	0.04	Nonbasis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2000000	14,316,000,000	0.01	11,012,800	13,003,214,000	0.08	0.16	Nonbasis
F. Konstruksi	2838000000	14,316,000,000	19.82	1,310,966,100	13,003,214,000	10.08	1.97	Basis

Sektor	PDRB ADHK Papua Pegunungan 2025	Total PDRB Papua Pegunungan 2025	Pangsa Provinsi (%)	PDB Indonesia 2025	Total PDB Indonesia 2025	Pangsa Nasional (%)	LQ 2025	Keterangan
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1944000000	14,316,000,000	13.58	1,775,024,900	13,003,214,000	13.65	0.99	Nonbasis
H. Transportasi dan Pergudangan	1149000000	14,316,000,000	8.03	655,996,700	13,003,214,000	5.04	1.59	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	500000000	14,316,000,000	0.35	445,770,000	13,003,214,000	3.43	0.10	Nonbasis
J. Informasi dan Komunikasi	454000000	14,316,000,000	3.17	940,946,900	13,003,214,000	7.24	0.44	Nonbasis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1100000000	14,316,000,000	0.77	540,301,800	13,003,214,000	4.16	0.18	Nonbasis
L. Real Estat	672000000	14,316,000,000	4.69	365,072,100	13,003,214,000	2.81	1.67	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	1180000000	14,316,000,000	0.82	274,407,600	13,003,214,000	2.11	0.39	Nonbasis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2916000000	14,316,000,000	20.37	419,017,400	13,003,214,000	3.22	6.32	Basis
P. Jasa Pendidikan	625000000	14,316,000,000	4.37	390,904,500	13,003,214,000	3.01	1.45	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425000000	14,316,000,000	2.97	192,883,500	13,003,214,000	1.48	2.00	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	234000000	14,316,000,000	1.63	293,160,400	13,003,214,000	2.25	0.73	Nonbasis
TOTAL	14316000000	14,316,000,000	100.00	13,003,214,000	13,003,214,000	100.00		

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 17 sektor ekonomi terdapat 7 sektor yang tergolong basis dan 10 sektor nonbasis di Papua Pegunungan pada tahun 2025. Sektor basis tersebut meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,46), Konstruksi (1,97), Transportasi dan Pergudangan (1,59), Real Estat (1,67), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,32), Jasa Pendidikan (1,45), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,00). Sementara itu, sektor dengan nilai LQ kurang dari satu meliputi pertambangan, industri pengolahan, listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, serta jasa lainnya (BPS, 2025).

Sektor basis yang teridentifikasi memiliki karakteristik peranan dan tingkat spesialisasi yang berbeda dalam perekonomian Papua Pegunungan. Kondisi masing-masing sektor basis berdasarkan nilai PDRB dan LQ tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kondisi PDRB Sektor Basis Tahun 2025

Sektor basis	PDRB Papua Pegunungan	LQ 2025	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,483,000,000.00	1.46	Sektor Basis
F. Konstruksi	2,838,000,000.00	1.97	Sektor Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,149,000,000.00	1.59	Sektor Basis
L. Real Estat	672,000,000.00	1.67	Sektor Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,916,000,000.00	6.32	Sektor Basis
P. Jasa Pendidikan	625,000,000.00	1.45	Sektor Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,000,000.00	2.00	Sektor Basis

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki nilai LQ tertinggi sebesar 6,32 dengan PDRB sebesar Rp2.916.000.000, sedangkan sektor basis dengan nilai PDRB terbesar berikutnya adalah Konstruksi sebesar Rp2.838.000.000 dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp2.483.000.000.

2. Pembahasan

a. Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan

Temuan bahwa Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (26,34%) menegaskan adanya persoalan struktural yang mendasar di WOB ini. Tingginya angka kemiskinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah pedalaman yang terisolasi. Secara teoritis, isolasi geografis menciptakan hambatan spasial yang membatasi mobilitas barang, jasa, dan faktor produksi (Richardson, 1978).

Hambatan spasial ini berdampak langsung pada komponen GK. Di Papua Pegunungan, biaya logistik yang sangat tinggi akibat ketergantungan pada moda transportasi udara mengerek harga komoditas pokok (makanan dan non-makanan) ke tingkat yang ekstrem. Karena garis kemiskinan dihitung berdasarkan nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar modal kalori dan non-makanan, harga barang yang mahal secara otomatis menaikkan standar GK secara signifikan. Akibatnya, sebagian besar penduduk lokal yang secara nominal memiliki pendapatan tradisional (seperti dari pertanian subsisten) langsung jatuh di bawah garis kemiskinan makro yang ditetapkan.

Fenomena ini sejalan dengan argumen Todaro dan Smith (2015) mengenai lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), di mana keterbatasan infrastruktur menghambat akumulasi modal dan pertumbuhan pasar, yang pada akhirnya melanggengkan kemiskinan. Sebagai provinsi hasil pemekaran baru, kelembagaan dan kapasitas fiskal daerah di Papua Pegunungan masih berada dalam tahap transisi, sehingga belum mampu mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan yang bersifat masif dan terintegrasi.

Tren kemiskinan di Papua Pegunungan yang cenderung melandai dan tertahan di kluster atas (26%–27%) mengindikasikan adanya persistensi kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Berbeda dengan kemiskinan transien yang bersifat sementara akibat guncangan ekonomi jangka pendek, kemiskinan kronis di wilayah ini berakar pada absennya aset produktif dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sen, 1999).

Tren linear yang lambat menurun ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal konvensional, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun Dana Desa, belum mampu menyentuh akar masalah perekonomian masyarakat lokal (Wanimbo & Handoyo, 2025). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini diduga kuat bersifat tidak inklusif (*non-pro-poor growth*) atau mengalami fenomena *enclave economy*. Sektor yang tumbuh cepat kemungkinan besar adalah sektor padat modal atau sektor administrasi pemerintahan yang hanya menyerap tenaga kerja terdidik dari luar wilayah, sedangkan mayoritas penduduk asli yang mengandalkan sektor primer tetap berada di luar pusran pertumbuhan ekonomi tersebut.

Melihat karakteristik proporsi kemiskinan yang ekstrem dan bersifat struktural, strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan memerlukan reposisi paradigma. Kebijakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang bersifat konsumtif, melainkan harus diarahkan pada kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan. Di sinilah pentingnya Analisis Sektor Basis dengan pendekatan LQ. Untuk menurunkan angka kemiskinan secara masif, pemerintah daerah harus mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang saat ini berstatus sebagai sektor basis di Papua Pegunungan. Sektor basis inilah yang memiliki keunggulan komparatif dan mampu mendatangkan modal dari luar wilayah melalui aktivitas ekspor (Tarigan, 2005).

b. Analisis *Location Quotient* (LQ) di Provinsi Papua Pegunungan

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perekonomian Papua Pegunungan memiliki tujuh sektor basis dengan tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan struktur ekonomi nasional. Keberadaan sektor basis tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peranan relatif lebih besar dalam perekonomian Papua Pegunungan dibandingkan peranannya dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam analisis LQ, sektor dengan nilai $LQ > 1$ dikategorikan sebagai sektor basis karena memiliki tingkat spesialisasi relatif lebih tinggi di daerah yang dianalisis. Dengan tingkat spesialisasi yang tinggi, sektor basis hasil analisis LQ diyakini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Keunggulan daya saing yang dimilikinya memungkinkan daerah untuk menarik investasi asing dan domestik, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi (Dirgahayu, 2025).

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor dengan tingkat spesialisasi paling tinggi, ditunjukkan oleh nilai LQ sebesar 6,32. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Papua Pegunungan jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya pada tingkat nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi relatif sektor ini terhadap perekonomian Papua Pegunungan jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya pada tingkat nasional. Temuan serupa mengenai tingginya peranan sektor administrasi pemerintahan sebagai sektor basis juga ditemukan dalam penelitian mengenai sektor basis di wilayah lain, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut dapat memiliki

tingkat spesialisasi yang kuat dalam struktur ekonomi daerah (Wakur et al., 2025). Selain itu, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,00) serta Konstruksi (1,97) juga menunjukkan tingkat spesialisasi yang relatif kuat.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat, serta Jasa Pendidikan juga tergolong basis dengan nilai LQ masing-masing sebesar 1,46; 1,59; 1,67; dan 1,45. Dengan demikian, sektor basis Papua Pegunungan tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan ekonomi, tetapi mencakup sektor primer, konstruksi, transportasi, properti, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Pola tersebut menunjukkan bahwa identifikasi sektor basis melalui LQ dapat memberikan gambaran mengenai struktur dan spesialisasi ekonomi suatu wilayah (Kaparang, 2025).

Temuan di atas menunjukkan bahwa sektor basis Papua Pegunungan didominasi oleh sektor yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan penyediaan kebutuhan dasar serta pelayanan wilayah, di samping sektor pertanian dan konstruksi. Tingginya LQ Administrasi Pemerintahan menunjukkan kuatnya peranan sektor tersebut dalam struktur ekonomi daerah, sementara tingginya LQ konstruksi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi menunjukkan pentingnya aktivitas pembangunan serta pelayanan pendukung di wilayah Papua Pegunungan.

Keberadaan sektor basis dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah karena sektor tersebut memiliki peranan relatif lebih besar dalam perekonomian wilayah. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa identifikasi sektor basis melalui LQ dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan arah pengembangan ekonomi daerah dan penyusunan strategi pembangunan (Malacoppo et al., 2026). Dengan demikian, sektor-sektor basis tersebut dapat menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah karena memiliki peranan relatif lebih besar dibandingkan struktur ekonomi nasional. Namun, nilai LQ yang tinggi menunjukkan keunggulan relatif atau tingkat spesialisasi sektor, bukan secara langsung menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan paling tinggi atau paling potensial untuk dikembangkan.

Selain menunjukkan spesialisasi ekonomi, komposisi sektor basis tersebut juga menggambarkan adanya keterkaitan antara aktivitas pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan. Sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta real estat dapat dipandang sebagai sektor yang berkaitan dengan proses pembangunan dan penyediaan infrastruktur serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan peranan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya wilayah. Di sisi lain, sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa penyediaan layanan dasar memiliki peranan relatif besar dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur sektor basis Papua Pegunungan tidak hanya bertumpu pada kegiatan produksi, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, hasil LQ perlu dipahami sebagai gambaran keunggulan relatif sektor pada suatu periode dan belum dapat digunakan untuk menentukan sektor yang memiliki prospek pertumbuhan paling tinggi secara langsung. Sektor Administrasi Pemerintahan memiliki LQ paling tinggi, tetapi tingginya nilai tersebut terutama menunjukkan besarnya

spesialisasi relatif sektor dalam struktur ekonomi Papua Pegunungan dibandingkan nasional. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah perlu mempertimbangkan tidak hanya tingkat spesialisasi, tetapi juga besarnya kontribusi sektor, perkembangan pertumbuhan sektor, keterkaitan antarsektor, serta kemampuan sektor dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, hasil LQ dapat digunakan sebagai salah satu dasar awal dalam menentukan sektor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, kemudian dilengkapi dengan analisis ekonomi lainnya agar arah pengembangan sektor menjadi lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis LQ, terdapat tujuh sektor yang tergolong sebagai sektor basis di Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Ketujuh sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari satu yang menunjukkan bahwa kontribusi relatif masing-masing sektor terhadap perekonomian Papua Pegunungan lebih besar dibandingkan kontribusinya dalam struktur perekonomian nasional. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki nilai LQ tertinggi sebesar 6,32, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,00 serta Konstruksi sebesar 1,97. Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Papua Pegunungan memiliki spesialisasi pada sektor pemerintahan, pelayanan dasar, pembangunan, serta beberapa kegiatan ekonomi berbasis wilayah.

Sementara itu, sektor nonbasis terdiri atas Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor basis dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena memiliki peranan relatif lebih besar dibandingkan struktur ekonomi nasional. Namun, nilai LQ tidak secara langsung menunjukkan tingkat pertumbuhan maupun prospek pengembangan suatu sektor. Oleh sebab itu, hasil identifikasi sektor basis perlu dipadukan dengan indikator dan analisis lainnya agar kebijakan pengembangan ekonomi Papua Pegunungan dapat disusun berdasarkan kondisi dan potensi sektoral secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan disarankan menjadikan hasil analisis sektor basis sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama pada sektor yang memiliki peranan relatif besar seperti pertanian, konstruksi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan pemerintahan. Namun, pengembangan sektor tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada tingginya nilai LQ, melainkan juga mempertimbangkan pertumbuhan sektor, kontribusi terhadap PDRB, keterkaitan dengan sektor lainnya, serta kemampuan dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja. Analisis lanjutan seperti Tipologi Klassen, Shift Share, atau analisis pertumbuhan sektoral dapat digunakan untuk memperoleh

gambaran yang lebih lengkap mengenai sektor yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Papua Pegunungan.

REFERENSI

- Arsyad, L. (2005). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2026). *Indikator penting Provinsi Papua Pegunungan, edisi Maret 2026*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik RI. (2026). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen* (Berita Resmi Statistik No. 56/08/Th. XXIX). Badan Pusat Statistik.
- Belolon, H. K. (2025). Papua Pegunungan dalam bayang-bayang inflasi: Telaah kritis atas fenomena dependensi dalam bingkai ekonomi politik. *Jurnal Ilmu Perekonomian*, 3(2), 88–101.
- BPS. (2025). *PDRB provinsi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Dirgahayu, A. (2025). *Analisis komoditas basis dan unggulan* [Dokumen tidak diterbitkan].
- Glasson, J., & Marshall, T. (2007). *Regional planning*. Routledge.
- Indonesia, R. (2011). *Rencana induk percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal Papua*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kakwani, N., Khandker, S., & Son, H. H. (2004). *Pro-poor growth: Concepts and measurement with application to Vietnam* (Working Paper No. 38). International Poverty Centre.
- Kaparang, V. W. P. (2025). Identifikasi sektor unggulan Kabupaten Minahasa: Analisis dengan pendekatan Location Quotient (Lq). *Jurnal Ilmiah*, 1(5), 99–105.
- Malacoppo, G., Idris, M., & Syam, S. F. (2026). Analisis sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo Analysis of base and non-base sectors in economic growth in Palopo City. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1), 136–148.
- Mulia, F. S., & Rosalia, A. C. T. (2025). Analisis sektor unggulan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 261–276.
- Prasetyo, A. B. (2026). Kajian kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan indeks Foster-Greer-Thorbecke. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics*, 2026(1), 512–523.
- Richardson, H. W. (1978). *Regional economics*. University of Illinois Press.
- Romadhon, M. A., & Santosa, P. B. (2026). Analysis of the determinants of poverty in the Province of Papua. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2), 798–812.
- Salim, A. (2026). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu*, 6(1), 65–78.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Ed. Revisi). Bumi Aksara.
- Tempo.co. (2025, Juli 20). *Here are the Indonesian provinces with the highest poverty rates*. tempo.co
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development* (10th ed.). Pearson Addison-Wesley.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.

Wakur, P., Kumenaung, A. G., Manuel, G., & Kawung, V. (2025). Analisis struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(5), 138–148.

Wanimbo, E., & Handoyo, S. (2025). Unpacking poverty determinant in Papua with economic growth and special autonomy funds. *Journal of Development Economics and Social Studies*, 4(1), 12–25.